



Konflik Pembangunan Pelabuhan Di Kampung Manowa Dalam Novel *Si Anak Badai Karya Tere Liye*

Tegar Pratama Nurhardiansyah^{1*}, Fathur Rakhman², Eva Dwi Kurniawan³

¹Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta

²Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta

³Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta

e-mail: tegar.5211511104@student.uty.ac.id; fathur.5211511102@student.uty.ac.id; eva.dwi.kurniawan@staff.uty.ac.id

Info Artikel	Abstrak
<p>Masuk: 20 Nov 2023</p> <p>Diterima: 30 Nov 2023</p> <p>Diterbitkan: 05 Dec 2023</p> <p>Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur, KKN, Konflik Sosial, Heurmeneutika.</p>	<p>Pembangunan Infrastruktur mempunyai peranan penting dalam menunjang kemajuan suatu daerah. Salah satu infrastruktur yang dapat menunjang kemajuan sosial dan ekonomi suatu daerah adalah infrastruktur pelabuhan. Dalam upaya pembangunan pelabuhan di suatu daerah tidak lepas dari berbagai permasalahan yang menyertai pembangunan. Beberapa permasalahan yang ada berupa konflik sosial dengan terdusurnya masyarakat dari tempat tinggalnya dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Isu mengenai permasalahan pembangunan juga terdapat di dalam novel <i>Si Anak Badai</i> karya Tere Liye. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses terjadinya beberapa konflik selama pembangunan pelabuhan di Kampung Manowa pada novel <i>Si Anak Badai</i>. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi adalah teknis analisis dengan pendekatan secara Heurmeneutika melalui pemahaman makna yang tersembunyi dari setiap kutipan teks. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa permasalahan konflik terjadi karena upaya pembangunan tidak berlandaskan kepada perencanaan partisipatif dan terindikasi terjadi persengkongkolan yang berorientasi kepada keutungan finansial semata beberapa pihak sehingga terjadi konflik sosial antara masyarakat dan pemerintah.</p>

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu tahapan sentral dalam mendorong perkembangan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa. Pembangunan tidak hanya terbatas pada aspek non fisik melainkan juga aspek fisik, contoh aspek fisik dalam pembangunan berupa infrastruktur. Infrastruktur adalah aspek penting untuk kemajuan dan pencapaian pembangunan, baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi. Peranan infrastruktur dapat dikatakan sebagai media antara lingkungan sebagai suatu elemen dasar dengan sistem ekonomi dan sosial masyarakat (Anggraini, 2023: 13486). Usaha untuk mencapai pemenuhan infrastruktur membutuhkan penentuan alokasi ruang yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam konteks pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sangatlah krusial untuk memastikan bahwasannya sumber daya dan ruang yang tersedia dimanfaatkan dengan efisien guna memenuhi kebutuhan infrastruktur yang terus berkembang.

Keterbatasan penyediaan ruang sering kali menjadi suatu permasalahan dalam proses pembangunan infrastruktur. Keterbatasan ini mencakup lahan yang tersedia untuk pembangunan, termasuk pemilihan lokasi yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk melakukan pendekatan secara holistik dan bersifat partisipatif. Pengelolaan ruang harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Namun, pada praktiknya sering kali masyarakat justru menjadi korban dalam hal pembangunan salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang terbatas akan ketersediaan ruang sehingga harus dilakukan pengusuran tempat huni. Pengusuran merupakan tindakan pemerintah setempat yang mendorong pengusiran paksa, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap penduduk yang memanfaatkan lahan untuk keperluan tempat tinggal atau usaha (Nulhaqim, dkk, 2020: 110).

Salah satu infrastruktur yang memerlukan penyediaan ruang yang banyak adalah pelabuhan. Pelabuhan dapat didefinisikan sebagai wilayah perairan yang terlindung baik secara alami ataupun buatan dan dapat digunakan sebagai tempat berlindung kapal dan tempat melakukan bongkar muat yang dilengkapi dengan fasilitas terminal terdiri dari tambatan, gudang dan tempat penumpukan lain (Ahmadi, dkk, 2016: 11). Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur pelabuhan tentu saja memerlukan tempat yang luas, pengusuran sering kali menjadi solusi dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan ruang.

Pengusuran tentu saja akan berpengaruh terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Proses pengusuran membawa perubahan mendalam dalam struktur sosial masyarakat, sering kali memaksa mereka untuk mengubah pola hidup, keberlanjutan ekonomi, dan interaksi sosial masyarakat. Upaya pemenuhan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur juga dibahas dalam karya sastra novel berjudul *Si Anak Badai* karya Tere Liye. Dalam novel tersebut pembangunan infrastruktur memerlukan pengusuran sehingga menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat karena masyarakat merasa dirugikan dengan adanya pengusuran yang direncanakan, namun pada akhirnya pengusuran tersebut gagal dilaksanakan karena adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggara pembangunan. Praktik korupsi kolusi dan nepotisme merupakan persekongkolan dan pemufakatan untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan kerugian pada pihak tertentu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara (Umar, 2011: 111). Konflik yang ada di dalam pemenuhan infrastruktur yang terindikasi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pembangunan merupakan suatu permasalahan yang akan berdampak buruk bagi keberlanjutan.

Alasan peneliti memilih novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye sebagai objek penelitian adalah novel ini bercerita mengenai pembangunan sebuah infrastruktur Pelabuhan yang dianggap dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di dalamnya namun dengan konsekuensi melakukan pengusuran tanpa mempertimbangkan relokasi tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar yang berprofesi sebagian besar adalah nelayan.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Oktia Rahayu Ningsih, Amril Canrhas, dan Amrizal tahun 2022 dengan judul “Perjuangan Anak-anak Dalam Novel *Si Anak Badai* Karya Tere Liye”. Hasil penelitian tersebut adalah menggambarkan bentuk perjuangan anak-anak seperti perjuangan mereka dalam mempertahankan tanah kelahiran mereka dari pengusuran pembangunan pelabuhan, perjuangan mereka mengatur siasat untuk mengungkapkan kebenaran yang ada, kerja keras, serta jujur dan pantang menyerah melalui beberapa bentuk perjuangan seperti berjuang mencapai tujuan akhir, daya juang sebagai kompensasi, berjuang meraih superioritas pribadi dan berjuang meraih keberhasilan. Perbedaan yang akan penulis lakukan dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajian berupa fenomena penyebab konflik pembangunan infrastruktur di Kampung Manowa sehingga novel ini juga dapat dijadikan sebuah perhatian seorang perencana wilayah dan kota dalam pengadaan infrastruktur yang harus merencanakan sebuah pembangunan dengan berlandaskan kepada etika perencanaan partisipatif dan berkelanjutan.

METODE

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan Hermeneutika untuk menganalisis teks dengan teliti dan memahami makna yang tersembunyi di dalamnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual terhadap materi penelitian. Hasil interpretasi yang dihasilkan dari metode ini bersifat deskriptif dan berkualitas kualitatif, memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Objek formal penelitian ini adalah fenomena konflik pembangunan infrastruktur, sementara objek materialnya adalah novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye diterbitkan oleh PT. Sabak Grip Nusantara dengan ketebalan 335 halaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Infrastruktur merupakan faktor penunjang dalam memajukan suatu daerah. pembangunan infrastruktur yang terdapat di dalam novel *Si Anak Badai* berupa Pelabuhan. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, bab 1 pasal 1 butir (16) disebutkan Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta tempat perpindahan intra-dan antar moda transportasi.

Pembangunan pelabuhan di dalam novel *Si Anak Badai* ditujukan untuk memajukan Kampung Manowa dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera melalui peningkatan efisiensi distribusi barang dan mobilitas masyarakat di Kampung Manowa.

“Sudah saatnya tempat ini maju, mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Sudah saatnya Bapak-bapak menjadi lebih kaya, lebih sejahtera..”

...

“kami akan membuat pelabuhan besar. Tempat kapal-kapal bersandar”

(Liye, 2023: 90 – 91)

Kutipan kalimat diatas mencerminkan sebuah harapan untuk masyarakat Kampung Manowa dalam mengatasi ketertinggalan sosial dan ekonomi dari daerah lain melalui pembangunan pelabuhan besar yang diharapkan menjadi tindakan strategis oleh pemerintah karena dapat meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi distribusi perdagangan. Ambisi yang ingin dicapai dalam pembangunan pelabuhan di Kampung Manowa adalah bersandarnya kapal-kapal besar, menciptakan peluang baru dalam perdagangan dan interaksi sosial yang lebih luas sehingga membawa kemajuan ekonomi bagi masyarakat kampung tersebut.

Dalam pembangunan tentu saja akan menghadapi berbagai macam permasalahan salah satunya berupa konflik sosial dari masyarakat dengan adanya pro dan kontra. Konflik adalah pertentangan pendapat antara orang, kelompok, atau

organisasi untuk mencapai tujuan bersama (Sipayung, E.M 2016: 27). Pembangunan pelabuhan dalam Novel *Si Anak Badai* tidak lepas dari adanya konflik sosial. Beberapa masyarakat sekitar lokasi pembangunan merasa adanya pembangunan pelabuhan memberikan dampak negatif bagi mereka. Konflik sosial yang terjadi dalam pembangunan pelabuhan tersebut ditunjukkan melalui kutipan berikut.

“Sekarang orang-orang pintar itu akan membuat Pelabuhan di sini. Mereka tidak tahu apa dampaknya bagi kita”

...

“Lebih celaknya lagi, mereka tidak tahu apa dampaknya bagi kita. Yang penting Pelabuhan itu jadi, yang penting mereka mendapat uang banyak dari pembangunan Pelabuhan”

(Liye, 2023: 105)

Kutipan tersebut menunjukkan perspektif lain dari masyarakat terkait pembangunan pelabuhan di Kampung Manowa. Masyarakat mengungkapkan ketidakpastian dan kekhawatiran mereka terhadap rencana pembangunan pelabuhan. Timbulnya rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang hanya berfikir bahwasannya proyek pembangunan tersebut berjalan demi kepentingan finansial, tanpa memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat di dalamnya. Perencanaan secara komprehensif diperlukan dalam melakukan pembangunan khususnya pada pembangunan pelabuhan yang ada pada Novel *Si Anak Badai*.

Perencanaan pembangunan harus diupayakan secara komprehensif karena dapat memahami kerumitan dari suatu wilayah perencanaan, sehingga memungkinkan para pelaku perencanaan mampu memberikan rekomendasi dan mengambil berbagai tindakan sesuai dengan inisiatifnya (Nazarudin, 2015: 218). Kehadiran dari pemangku pemerintahan merupakan hal yang terpenting dalam penyelesaian sebuah konflik pembangunan dalam novel *Si Anak Badai* masyarakat merasa kecewa dikarenakan gubernur tidak dapat turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan perencanaan pembangunan pelabuhan di Kampung Manowa melainkan hanya utusan dari gubernur

“Mengapa hanya utusan gubernur yang datang? Ke mana gubernurnya?”

...

“Beberapa waktu lalu saat pertemuan di kantor kecamatan, itu tidak berakhir dengan baik”

(Liye, 2023: 147-148)

Seperti yang terlihat pada kedua kutipan di atas yang mengungkapkan bahwa terjadi konflik atau ketidaksepakatan antara masyarakat dengan utusan gubernur. Pertemuan dengan utusan gubernur yang diadakan sebelumnya pada kantor kecamatan tidak menemukan titik terang hal ini mengakibatkan adanya ketidakpuasan dari pihak masyarakat yang bertanya-tanya mengapa bukan gubernur sendiri yang datang secara langsung untuk berdiskusi dengan masyarakat.

Gaya kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam upaya keberhasilan arah pembangunan yang dituju. Pada novel *Si Anak Badai* gaya kepemimpinan yang terdapat pada kutipan teks menggambarkan bahwasannya proses pembangunan menggunakan gaya kepemimpinan secara delegatif. Gaya delegatif merupakan ciri kepemimpinan akan jarang dalam memberikan arahan, dan pembuat keputusan diserahkan kepada bawahannya (Mattayang, 2019: 49). Gaya kepemimpinan secara delegatif memiliki kekurangan tersendiri yaitu kurangnya kontrol dan pengawasan langsung dari pimpinan pemberi tugas. Kunci keberhasilan dalam menerapkan gaya kepemimpinan termasuk gaya kepemimpinan delegatif terletak pada kemampuan pemimpin untuk melihat taraf kematangan bawahan (Prasetya dkk, 2017: 199)

“Saya sudah berkeliling dengan kepala kampung. Kalau boleh jujur kampung ini tidak layak huni”

...

“Saya sudah melihat bangunan sekolah. Masih bagus kandang kambing di kota..”

(Liye, 2023: 160)

Kedua kutipan tersebut menunjukkan pandangan dari utusan gubernur terhadap Kampung Manowa pada saat pertemuan dengan masyarakat Kampung Manowa. Kutipan pertama menunjukkan kejujuran dari utusan gubernur yang melihat bahwa Kampung Manowa merupakan kampung yang tidak layak huni. Utusan gubernur melihat sesuatu yang membuatnya merasa Kampung Manowa tidak layak untuk dihuni. Pada kutipan selanjutnya, utusan gubernur membandingkan kondisi bangunan sekolah yang ada pada Kampung Manowa dengan kandang kambing di kota. Kutipan tersebut menunjukkan kritik terhadap kondisi infrastruktur yang ada pada Kampung Manowa, kandang kambing digunakan sebagai simbol rendah yang menunjukkan bahwa fasilitas yang ada pada Kampung Manowa tidak dalam kondisi yang baik. Dalam merencanakan pembangunan suatu infrastruktur perlu adanya pertimbangan atas perikehidupan/mata pencaharian masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam suatu pembangunan infrastruktur guna memberi masukan terhadap pemerintah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat (Ismatullah, 2021: 3).

Mata pencaharian merupakan unsur budaya yang sangat penting dalam memenuhi pokok kehidupan sekelompok masyarakat (Septiana, 2018: 38). Kondisi sosial yang ada di Kampung Manowa, mayoritas masyarakat merupakan seorang Nelayan. Oleh karena itu, mereka meminta untuk direlokasi ke tempat yang masih berada di tepi sungai dengan begitu mereka tetap memiliki akses yang mudah dan cepat menuju laut dengan begitu masyarakat Kampung Manowa dapat melanjutkan budaya turun temurun mereka sebagai seorang nelayan. Sejalan dengan tuntutan masyarakat Kampung Manowa. Menurut (Aotoma dan Klavert, 2021: 2). Relokasi bukan hanya sekedar perpindahan tempat dari segi ruang geografis, tetapi juga menyangkut berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, serta budaya.

“Maaf, Bapak utusan gubernur . saya minta Bapak meninjau kembali. Rambas itu bukan daerah pinggiran Sungai”

(Liye, 2023: 162)

Kutipan di atas merupakan kutipan yang diutarakan oleh salah satu masyarakat Kampung Manowa kepada bapak utusan gubernur yang mana masyarakat meminta untuk dilakukan peninjauan kembali atas rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat Kampung Manowa. Masyarakat menilai bahwa lokasi relokasi yang disebut dengan Rambas bukan merupakan bagian dari daerah pinggiran sungai hal ini tentu saja akan berkaitan dengan mata pencaharian Masyarakat Kampung Manowa yang mayoritas nelayan. Lokasi tempat tinggal yang jauh dari pinggiran sungai akan memengaruhi pekerjaan mereka.

Pada kenyatannya pembangunan infrastruktur yang ada di Kampung Manowa bukan berlandaskan terhadap kebutuhan masyarakat, melainkan konflik kepentingan para pejabat yang berada di novel *Si Anak Badai* mulai dari camat, utusan gubernur, bahkan gubernur itu sendiri. Peristiwa tersebut merupakan salah satu ciri dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut Martiningsih (2017: 2015) ketiganya merupakan sikap dan perbuatan yang tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian dari pemberi kerja dan pelaksana kerja yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.

“Ini belum seberapa Tiong. Sepanjang kau bisa diandalkan, Pelabuhan selesai, dana cair, kau akan liburan ke luar negeri”

..

“ Termasuk untuk ‘Pak Gubenur’ juga sudah ditransfer. Mungkin bisa digunakan untuk pencalonan tahun depan ”

(Liye, 2023: 323-324)

Kutipan diatas merupakan gambaran persengkongkolan yang terjadi antara utusan gubernur dan camat yang terdapat di novel *Si Anak Badai*. Utusan gubernur menjanjikan sebuah bayaran kepada camat bahwasannya jika proyek ini berhasil akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar bagi dirinya dan camat. Bahkan, gubernur sendiri akan mendapatkan jatah jikalau memberikan kemudahan akses persetujuan untuk mempermudah izin pembangunan pelabuhan.

KESIMPULAN

Simpulan dari hasil penelitian tentang konflik pembangunan infrastruktur pelabuhan di Kampung Manowa dalam novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye menyoroti pentingnya etika seorang perencana dalam konteks perencanaan wilayah dan kota. Pembangunan infrastruktur harus berjalan secara partisipatif dengan menggandeng masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam merumuskan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Dengan begitu proses pembangunan dapat bersifat akuntabel dan transparan. Novel ini bukan hanya sebuah karya sastra semata yang menghibur, melainkan renungan tersendiri bagi para pemangku kepentingan untuk tidak melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, N., Kusumastanto, T., & Siahaan, E. I. (2016). Strategi Pengembangan Pelabuhan Berwawasan Lingkungan (Greenport) Studi Kasus: Pelabuhan Cigading-Indonesia. *Warta Penelitian Perhubungan*, 28(1), 9-26. DOI : <http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v28i1.697>
- Angraini, Juni. (2023). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sektor Pariwisata Terhadap Kepuasan Wisatawan di Kabupaten Karo Sumatera Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, pp. 13485—13491. DOI : <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1793>
- Aotama, R. C., & Klavert, D. R. H. (2021). Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, pp. 1—9. DOI : [10.21831/socia.v18i1.37719](https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.37719)
- Ismatullah, Mahendra, G. K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, Vol.3, No. 1, pp. 1—11. DOI: <https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i1.556>
- Liye, Tere. (2023). *Si Anak Badai*, Depok. PT Sabak Grip Nusantara. pp 1—335.
- Martiningsih, D. (2017). Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme). *PUSAKA*, pp. 201—218. DOI: <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.180>
- Mattayang, B. (2019). Tipe dan gaya kepemimpinan: suatu tinjauan teoritis. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, pp. 45-52. DOI : <http://dx.doi.org/10.35914/jemma.v2i2.247>
- Nazarudin, Teuku. (2015). "Perencanaan Kota secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan (Comprehensive Urban Planning Based On Integrative Law Towards Sustainable Urban Development)." *Jurnal Cita Hukum*, vol. 3, no. 2, 2015: 213—244. DOI: <https://dx.doi.org/10.15408/jch.v2i2.2315>
- Ningsih, O. R., dkk. (2022). Perjuangan Anak-Anak dalam Novel *Si Anak Badai* Karya Tere Liye. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 6(3), 323-333. DOI: <https://doi.org/10.33369/jik.v6i3.24224>

- Nulhaqim, Soni Ahmad, Eva Nuriyah Hidayat, Muhammad Fedryansyah. (2020). "Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan." *Share: Social Work Journal* 10.1 (2020): 109—117. DOI : <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.25173>
- Prasetya, D. W., Wasiati, I., & Azhari, A. K. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Delekatif Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. *International Journal of Social Science and Business*, pp. 197—208. DOI : <https://doi.org/10.23887/ijssb.v1i3.11835>
- Republik Indonesia, (2008). *UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran*, Pasal 1
- Septiana, S. (2018). Sistem sosial-budaya pantai: mata pencaharian nelayan dan pengolah ikan di Kelurahan Pangung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, pp. 83—92. DOI : <https://doi.org/10.14710/sabda.13.1.83-92>
- Sipayung, M. E. (2016). Konflik sosial dalam novel Maryam karya Okky Madasari: Kajian sosiologi sastra. *Sintesis*, 10(1), 22—34. DOI: (2016). <https://doi.org/10.24071/sin.v10i1.164>
- Umar, H. (2011). Peran akuntan dalam pemberantasan korupsi. *Sosiohumaniora*, pp 108—126. DOI : <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v13i1.5465>